



**PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG PEMBANTU TEMBILAHAN
BAGI PETANI KELAPA
DI DESA TELUK KELASA KECAMATAN KERITANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun Oleh:

Nama : SYARIPUDDIN

NPM : 2014570001

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1440 H/2018 M

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

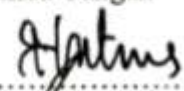

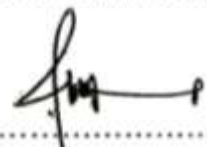
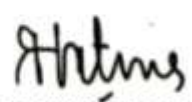
Skripsi yang berjudul: Problematika Pembiayaan Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan Bagi Petani Kelapa di Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang disusun oleh: SYARIPUDDIN, Nomor Pokok Mahasiswa: 2014570001. Telah diujikan pada hari/tanggal: 15 September 2018 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		22-9-2018
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		22-9-2018
<u>Nurhidayat, S.Ag., M.M.</u> Dosen Pembimbing		22-9-2018
<u>Dr. H. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag</u> Dosen Penguji I		22-9-2018
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Dosen Penguji II		22-9-2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYARIPUDDIN
NPM : 2014570001
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Problematika Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tembilahan bagi Petani Kelapa di Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 05 Muharram 1440 H
15 September 2018 M

Yang Menyatakan,

**METERAI
TEMPEL**
D1E1EAF358119566

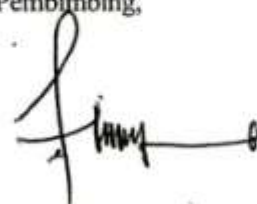
SYARIPUDDIN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Kontribusi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tembilahan terhadap Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir**" yang disusun oleh **Syaripudin**, Nomor **Pokok Mahasiswa: 2014570001** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 05 September 2018

Pembimbing,



Nurhidayat, S.Ag., M.M.,

NAMA : SYARIPUDDIN
NIM : 2014570001
PRODI : MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

ABSTRAK

Problematika Pembiayaan Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan Bagi Petani Kelapa Di Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi bahwa minimnya pembiayaan perbankan syariah di sektor pertanian disebabkan risiko pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan pembiayaan, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah pada masyarakat petani kelapa. Sehingga yang menjadi tantangannya adalah bagaimana perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaannya secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan dalam pembiayaan sektor kelapa dan sejauh mana intensitas penggunaan jasa layanan keuangan syariah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan pada pelaku usahatani kelapa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. *Informan* penelitian yang dipilih adalah pegawai/karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan yang langsung menangani masalah pembiayaan yaitu pegawai/karyawan bagian *marketing, Consumer Banking Relationship Manager* (CBRM). Subjek lainnya adalah masyarakat pelaku usahatani sektor kelapa di wilayah Indragiri Hilir - Riau.

Proses analisis data dan informasi berlangsung sekaligus pada saat dilakukan pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas melalui reduksi data, *display*, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri adalah minimnya informasi yang diperoleh petani, penyediaan agunan yang sulit dipenuhi nasabah, penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian masih kurang *matching* dengan *nature* usaha di perbankan, Bank Syariah Mandiri belum berani karena sangat berisiko (*high risk*), dan masih terfokus pada agribisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri kepada petani kelapa sudah menjadi solusi dengan adanya produk pembiayaan sektor agribisnis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan belum dirasakan menyeluruh oleh pelaku usahatani kelapa khususnya di wilayah Indragiri Hilir - Riau. Masalah tersebut karena minimnya sosialisasi tentang produk perbankan serta jangkauan yang terbatas antara Bank dengan wilayah agribisnis kelapa.

Kata kunci: Problematika Bank Syariah Mandiri dan Petani Kelapa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Dzat Yang Maha Kuasa, segala puji atas Dzat Yang Maha Suci, serta syukur kepada Dzat Yang Maha Ghafur. Yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk beribadah kepada-Nya dan untuk bersholawat kepada kekasih-Nya, serta dengan izin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat serta salam senantiasa terucap kepada manusia yang agung. Semoga rahmat Allah selamanya mengalir keharibaan sang pemimpin kita semua, Muhammad ibn Abdullah. Dialah rosul kemanusiaan. Dialah teladan hidup penuh ketakwaan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak mudah jalan yang ditempuh untuk bisa merampungkan tugas akhir ini. Sifat malas, proses perizinan, pengumpulan materi dan data merupakan tantangan yang kerap kali dihadapi oleh penulis. Dengan anugrah yang Allah berikan, penulis mampu melewati semua tantangan, dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi, rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, M.H., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta jajaran.
2. Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H., sebagai Dekan Fakultas Agama Islam, bapak Drs.Tajudin, MA selaku Wadek I, bapak Asep Supyadillsh, M.Ag., selaku Wadek II dan bapak Nurhadi, MA selaku Wadek III.
3. Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M.,
4. Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M., sebagai pembimbing skripsi yang selalu setia dan sabar membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penulis persembahkan skripsi ini kepada bapak (Mansur) dan kepada ibu (Nuhaya). Setiap tetes keringat dan air mata yang mengalir adalah doa yang

tak pernah terputus. Kalian adalah anugrah terindah yang Allah berikan kepada penulis.

6. Seluruh staff Bank Mandiri Syariah KCP Tembilahan, khususnya Pak Muhammad Reza Jumentara (Pimpinan BSM KCP Tembilahan) dan Pak Said Marhalim (Consumer Banking Relationship Manager). Yang telah meluangkan waktu extra untuk mendampingi penulis di tengah padatnya operasional BSM.
7. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Indragiri Hilir Selatan. Kalian pemberi makna dalam sebuah persahabatan.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Manajemen Perbankan Syariah periode 2015/2016.
9. Keluarga Besar KKN Kelompok 16 FAI UMJ.
10. Semua pihak yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Hanya ucapan inilah yang dapat penulis berikan, semoga Allah yang akan membalas semua kebaikan keluarga dan sahabat-sahabatku tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

Jakarta,05 September 2018

SYARIPUDIN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	13
1. Bank Syariah.....	13
2. Pengertian Pembiayaan.....	19
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	25
4. Agribisnis.....	30
B. Kerangka Pemikiran.....	33
C. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37

C. Metode dan Prosedur Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan data	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Pemeriksaan keabsahan data.....	40
I. Teknik Penulisan.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	43
B. Jumlah Bank Syariah di Kabupaten Indragiri Hilir.....	61
C. Temuan Penelitian.....	61
D. Pembahasan Hasil Temuan Penelitian	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasrat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam arti sebenarnya adalah tujuan mulia yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia termasuk sektor agribisnis sebagai sub sistem di dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara agraris, namun pada kenyataannya agribisnis di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Padahal sektor agribisnis memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Di masa lampau, agribisnis di Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan telah memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan angka kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walaupun telah ada pergeseran

menuju bentuk agribisnis dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam sub-sektor.¹

Keanekaragaman hayati diciptakan Allah SWT untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal tersebut merupakan rahmat yang diberikan Allah SWT terhadap manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Thahaa ayat 53 sebagai berikut:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

*Artinya: Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Qs. Thahaa/20:53).*²

Sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat strategis, setidaknya ada lima alasan mengapa sektor pertanian menjadi strategis. Pertama, pertanian merupakan sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Kedua, merupakan penyedia bahan baku bagi sektor industri (agroindustri). Ketiga, memberikan kontribusi bagi devisa negara melalui komoditas yang diekspor. Keempat, menyediakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja pedesaan dan kelima, perlu dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem (lingkungan). Ironisnya, meski pertanian dianggap strategis, tetapi kondisi petaninya kian tahun termarginalkan. Dari data sensus pertanian Badan Pusat Statistik tahun 2005, luas

¹Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia, <http://siteresources.worldbank.org/intindonesia/resource/Publication/280016-1106130305439//agriculture.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2018

²Lihat, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Alquran. Alquran dan Terjemahnya. (Madinah Munawarah Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, 1415 H), h.345

tanaman perkebunan kelapa sawit 2991,3 Ha meningkat 66,17% pada tahun 2009 yang jumlahnya 4520,6 Ha. Dengan melihat lahan yang semakin meningkat, produksi akan kelapa sawit pun kian meningkat, produksi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2009 mencapai 12.954.662 ton meningkat 39,33% dari tahun 2005 silam dengan produksi 5.094.885 ton. Sayangnya petani gurem ini mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 16,6% rakyat Indonesia yang termasuk kelompok miskin, 60%-nya adalah kalangan petani sawit.³

Pertanaman kelapa tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia. Pada tahun 2010, luas areal pertanaman kelapa 3,7 juta ha, yang terdiri atas perkebunan rakyat (98,14%), perkebunan besar negara (0,10%), dan perkebunan besar swasta (1,73%). Pada tahun 2010, produksi kelapa (equivalent kopra) sebesar 3,26 juta ton, yang terdiri atas perkebunan rakyat sebesar 3,18 juta ton, perkebunan besar negara 2,33 ribu ton, dan perkebunan besar swasta 80,97 ribu ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010).⁴

Penanganan komoditas kelapa melibatkan 7 juta KK atau setara dengan 35 juta jiwa, suatu serapan tenaga kerja yang sangat besar di bidang pertanian. Namun demikian, kondisi ekonomi para petani kelapa secara umum masih memprihatinkan. Hasil survei Cogent (Coconut Germplasm Internasional) tahun 2003 menunjukkan bahwa pendapatan petani kelapa rata-rata US\$ 200/th, tergolong miskin. Rendahnya produktivitas dan pendapatan petani kelapa disebabkan antara lain oleh penanganan usaha tani kelapa kurang mendapat perhatian, petani menanam bibit kelapa tanpa melalui seleksi yang memadai,

³ Ukay Karyadi, Politik Pertanian Untuk Kesejahteraan Petani, Kamis, 09 Februari 2006, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/09/opi02.html>, diunduh pada tanggal 13 September 2018

⁴ Direktorat Jenderal Perkebunan. 2010. Rencana strategis pembangunan perkebunan. Kementerian Pertanian, Jakarta. (TD).

pertanaman kelapa kurang terawat, kurang berkembangnya usaha pemanfaatan lahan di antara tanaman kelapa, dan belum berkembangnya usaha diversifikasi.

Sebaliknya pabrikan memperoleh pendapatan yang menggembirakan, ditandai dengan semakin meluasnya wilayah usaha dan aneka ragam produk yang dikembangkan, walaupun sejak tahun 1992 industri kelapa mengalami kekurangan pasokan bahan baku sekitar 30-40% dari kapasitas terpasang. Komoditas kelapa mengalami kejayaan pada periode 1960-1970an dengan produk utamanya berupa kopra. Pada masa itu, usaha kopra dirasakan sebagai usaha yang sangat menguntungkan, dan bahkan koperasi kopra merupakan salah satu koperasi yang sangat berkembang dan menjadi organisasi andalan bagi para petani kelapa. Sejak periode 1980-2010, peran kelapa sebagai sumber bahan baku minyak goreng makin tergeser oleh komoditas kelapa sawit. Periode bulan Pebruari-April 2011, harga kopra makin membaik yakni Rp. 7.500-11.000/kg dan diharapkan harga kopra Rp. 7.500/kg akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Beragam upaya yang dilakukan dan telah membuahkan hasil positif bagi perkembangan agribisnis kelapa. Namun masih banyak upaya lain yang perlu dilakukan ke depan, antara lain adanya industri pembibitan kelapa yang dapat menjamin pasokan sumber bibit unggul secara massal.

Ketiadaan industri pembibitan kelapa menyebabkan para petani dan perusahaan perkebunan kelapa masih menggunakan bibit dari kebunnya sendiri yang produktivitasnya rendah. Keadaan ini mengakibatkan tingkat produksi kelapa rendah (sekitar 1,29 ton kopra/ha/th) dibanding potensi produksi Kelapa Dalam Unggul yang dapat mencapai 4 ton kopra/ha/th. Selain itu, rendahnya dukungan ketersediaan sarana produksi dan alat pengolahan oleh pihak-pihak

terkait, penggunaan pupuk yang belum optimal, pengendalian hama dan penyakit tanaman pada tingkat petani, serta belum berkembangnya kelembagaan yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan subsistem produksi, pengolahan, dan pemasaran.⁵

Pada subsistem pengolahan maupun pemasaran, industri hilir kelapa masih terbatas pada produksi minyak goreng dan produk primer seperti kopra, kelapa parut, dan sebagainya. Teknologi pengolahan virgin coconut oil (VCO) yang diketahui menghasilkan produk dengan berbagai manfaat kesehatan, ternyata belum memberikan tambahan pendapatan yang nyata bagi petani. Kondisi yang sama terjadi pula pada pengembangan minyak kelapa sebagai bahan bakar alternatif. Pengembangan kelapa saat ini diharapkan akan memberi manfaat pada kehidupan petani yang lebih layak, petani menjadi pelaku agribisnis kelapa, tumbuhnya semangat petani untuk melakukan usaha tani secara efisien. Selain itu bahan baku kontinu untuk pengolahan tingkat kelompok tani/gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan industri pengolahan dapat terpanuhi, serta kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani/gapoktan untuk memudahkan transfer teknologi dalam pengembangan usaha tani dan produk kelapa dapat tumbuh dan berkembang. Pemberdayaan kelembagaan perkebunan dilaksanakan melalui wadah kelompok tani atau gabungan kelompok tani perkebunan yang memungkinkan kelembagaan kelompok tani berkembang dan memberikan nilai tambah bagi kelompok tani bersama lingkungannya.⁶

⁵ Uno, S.S. 2008. Agribisnis Asia Tenggara; Dimana posisi Indonesia?. Majalah Agro Observer, 15 Maret-15 April 2008 Hlm. 12-14

⁶ Irawadi, D. 2000. Kontribusi teknologi proses dalam pembangunan agroindustri perkebunan menuju otonomi daerah. Ekspose Hasil Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan. 20 November 2000, Jakarta.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional yang dilakukan melalui Pembangunan Nasional terpadu dan menyeluruh maka pembangunan sektor ekonomi mutlak diperlukan yaitu pembangunan ekonomi yang berimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemajuan pertanian yang tangguh dengan sasaran untuk menaikkan tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kehidupan untuk lebih sejahtera dilakukan dengan peningkatan setiap produk yang dihasilkan sektor kegiatan ekonomi.

Dengan kenyataan tersebut maka sudah sewajarnya apabila potensi sumberdaya pertanian yang ada dikembangkan pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memelihara dan menjaga kelestarian sumberdaya pertanian ini, disamping memperhatikan faktor-faktor yang menunjang perolehan produksi petani tersebut.

Pembangunan pertanian kedepan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia. Untuk itu diperlukan sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas dan handal, dengan memiliki ciri adanya kemandirian, profesionalitas, berjiwa wirausaha (entrepreneurship) berdedikasi, etos kerja yang tinggi, disiplin dan moral yang luhur serta berwawasan global. Sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lainnya akan mampu membangun usaha tani yang berdaya guna dan berdaya saing. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian. salah satunya adalah melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan merupakan proses

penyebarluasan yang dapat berupa penyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang di hasilkan oleh perguruan tinggi ke masyarakat sehingga diharapkan dapat membantu proses perkembangan masyarakat di bidang fisik dan ekonomi. Penyuluhan juga tidak sekedar proses perubahan perilaku pada diri seseorang tetapi harus mampu merubah perilaku sosial masyarakat.⁷

Kegiatan penyuluhan sektor perkebunan di Provinsi Riau masih belum mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah. Kondisi keberpihakan penyuluhan dalam kegiatan perkebunan masih dirasakan kurang, dimana penyuluhan perkebunan hanya menjadi bagian dalam kegiatan penyuluhan pertanian, meskipun dalam kebijakan baru penyuluh pertanian menjadi penyuluh yang polivalen. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang membutuhkan keberpihakan penyuluhan terhadap sektor perkebunan. Keberpihakan penyuluhan akan meningkatkan produktivitas perkebunan terutama perkebunan kelapa pola swadaya. Masyarakat akan menjadi lebih peka, cerdas, dan antisipatif terhadap segala kemungkinan yang datang dan dapat menyelesaikannya kemudian pembinaan dalam bantuan permodalan juga sangat penting untuk dilakukan dukungan khusus. Dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu perkebunan kelapa yang terluas, dengan luas 392.193ha dan produksi 342.225 ton/tahun serta jumlah petani kelapa dengan jumlah 80.040 KK yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan 11 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Rendahnya hasil produksi petani pola swadaya menunjukkan bahwa kegiatan dalam

⁷ Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.hal.51

membudidayakan tanaman kelapa masih berlangsung secara alami tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga. Ini berarti bahwa peran penyuluhan sebagai pendamping masyarakat masih harus dipertahankan perannya sebagai agen yang dapat mewujudkan keberdayaan petani agar mencapai produksi yang optimal

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor pertanian (politik pertanian). Jika mencermati berbagai hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa sektor perbankan dengan sistem syariah merupakan sektor terpenting dalam pergerakan ekonomi. Begitu juga sektor pertanian dengan sistem agribisnis. Dalam menghadapi badai krisis ekonomi, ternyata keduanya mampu bertahan dan terbukti memiliki pertumbuhan positif.⁸

Dengan demikian yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana cara menyatukan sektor agribisnis yang penuh dengan resiko dan sektor perbankan syariah yang menetapkan sistem bagi hasil menjadi sebuah kekuatan membangun perekonomian bangsa yang bebas bunga.⁹

Masyarakat petani di Indragiri Hilir Kabupaten Riau ini pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan financial, mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk bercocok tanam, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian petani Indragiri Hilir yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata turut bekerjasama dengan para nelayan lainnya untuk memproduksi tanaman Kelapa. Dalam kondisi tersebut perlu adanya pembiayaan yang sesuai dengan

⁸ Pusat Pembiayaan Pertanian, Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h. 38

⁹ *Ibid*, Hal 39

kebutuhan petani di Indragiri Hilir dengan menggunakan pembiayaan di Bank Syariah. Namun sejauh ini tidak banyak para petani yang memanfaatkan Bank Syariah dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan. Salah satu penyebab adalah kurangnya sosialisasi produk Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan terhadap petani kelapa di Indragiri Hilir.

Dalam praktek kerjasama antara petani dengan Bank Syariah perlu di teliti sejauh mana potensi masyarakat petani di Indragiri Hilir dalam menggunakan jasa layanan perbankan syariah Khususnya Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan.

Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul "*Kontribusi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tembilahan terhadap Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir*" dengan lokasi penelitian di Desa Indragiri Hilir Selatan Kabupaten Riau Sumatera Selatan".

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini mencakup pada pembiayaan usaha produktif pada Bank Syariah, mulai dari mekanisme pembiayaan, prosedur pembiayaan, manfaat pembiayaan. Sedangkan subfokus penelitian ini mengamati tentang penggunaan pembiayaan usaha produktif pada petani.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih jelasnya maka perumusan masalah diatas diungkapkan yakni : Bagaimana problematika

pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan bagi petani kelapa Desa Teluk Kelasa?

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti sehingga sedikit banyak penelitian ini sebagai aplikatif dari teori yang selama ini peneliti terima dan juga tentunya menambah wawasan peneliti untuk berpikir secara kritis.

2. Bagi Instansi/ lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif bagi lembaga terkait dalam hal ini Bank Syariah sebagai pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pemberdayaan usaha petani.

3. Bagi Disiplin Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu Keuangan dan Perbankan Syariah untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulis

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang saling berkaitan, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum dalam penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang meliputi pengertian Pembiayaan, Pengertian Agribisnis, Kerangka Berfikir dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, diuraikan berbagai hal tentang Metode Penelitian atau cara melakukan penelitian, di antaranya : tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik pengolahan data teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data, dan teknik penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas deskripsi konseptual dan hasil dari temuan penelitian yakni “*Problematika Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah bagi Petani Kelapa Desa Teluk Kelasa*” dengan lokasi penelitian di Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Selatan Riau Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Bank Syariah

Setelah krisis ekonomi tahun 1998, Bangsa Indonesia semakin giat membangun berbagai aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara terutama pembangunan dalam sektor ekonomi. Di sini peran bank syariah cukup diperhitungkan, sehingga bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Saat ini banyak Bank Syariah yang berdiri di Indonesia, semua bank syariah saling bersaing dalam membuat produk, dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak produk-produk yang telah dibuat Bank Syariah antara lain produk pembiayaan, penghimpun dana, ataupun produk jasa. Semua produk ditujukan untuk melayani masyarakat. Produk perbankan syariah yang sangat populer yang banyak diminati pembiayaan ini banyak macamnya antara lain: produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana jasa untuk memenuhi kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer misalnya, makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar atau pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih

mewah dari kebutuhan primer baik berupa barang ataupun jasa, seperti pendidikan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.¹⁰

Penghimpunan dana masyarakat meningkat $\pm 32\%$ yang sebagian besar (58,39%) terhimpun dalam Deposito. Sedangkan dari sisi penyaluran dana meningkat $\pm 40\%$ menjadi Rp135,58 triliun dimana piutang Murabahah paling mendominasi dengan portofolio sebesar 59,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah masih didominasi oleh dana mahal dalam penghimpunan dan menyalurkannya dalam *pricing* (marjin dari piutang Murabahah) yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata suku bunga (rata-rata tahun 2012 s.d September 2012 *equivalent rate* sebesar 14,31%). Atas hal tersebut perlu dikaji kembali faktor-faktor yang berpengaruh dalam menggeser struktur bisnis perbankan syariah sehingga menjadi lembaga keuangan yang efisien dan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar.¹¹

Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 5,74% sampai dengan 6,28% (*equivalent rate*), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,32% dan giro sekitar 0,88% (*equivalent rate*). Produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan.¹²

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari teori ke praktik ,(Jakarta:Gema Insani 2001), hlm.168

¹¹ Cristine Novita Nababan, "Pembiayaan Perbankan Syariah Naik 14,3%" , <https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-bank-syariah-tumbuh-4341>, diakses pada pukul 10.00 wib, 3 januari 2018

¹² Hendra Gunawan, "Imbal Hasil Deposito Masih Sekitar 9%" , <http://investasi.kontan.co.id/news/hasil-depositosyariah-masih-sekitar-9-1>, diakses 13.45 wib pada 3 januari 2018

Pentingnya kegiatan pembiayaan dan produk-produk pada Bank Syariah sangat berperan besar pada perekonomian umat, Islam mengatur berbagai macam hal yang tentunya kegiatan ekonomi tersebut berkaitan erat dengan hubungan manusia dengan manusia (muamalah). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (prinsip *tabbaru'*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai/ditipu karena ada sesuatu yang *unknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*), atau dalam bahasa fiqhnya disebut *tadlis*.

Menurut Adiwarman Karim dalam buku *Bank Islam* bahwa ada juga prinsip yang tidak boleh dilanggar ialah prinsip , لا تظلمون و لا تظلمون yakni jangan mendzalimi dan jangan didzalimi.”¹³

Konsep bermuamalah tersebut di atas dapat dibandingkan dengan praktik-praktik dalam kegiatan agribisnis di Indonesia. Banyak praktik-praktik yang sangat menyengsarakan petani, seperti pembelian secara sistem ijon, kegiatan ikhtiar oleh tengkulak, peminjaman modal dengan sistem riba. Kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan makin beratnya kehidupan para petani karena mereka terjerat dalam sistem-sistem yang sangat merugikan. Untuk itu lembaga keuangan syariah selaku tonggak penerapan cara bermuamalah secara syariah berperan penting dan sebagai

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h.30

solusi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, dimana dari lembaga keuangan syariah tersebut mempunyai sistem saling menguntungkan antara petani dalam memecahkan masalah-masalah pembiayaan.¹⁴

Dalam menjalankan fungsi dan perannya secara umum, pengembangan produk bank syariah yang merupakan sistem operasional bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa.¹⁵

- a) Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari pihak yang surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan dana adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana dari pihak kedua (pinjaman dari bank dan bukan bank, serta dari Bank Indonesia), dan dana dari pihak ketiga (nasabah).
- b) Bank syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan berupa jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu: *Earning Asset* (aktiva yang menghasilkan) dan *Earning Non Asset* (aktiva yang tidak menghasilkan).¹⁶ Aktiva yang menghasilkan atau *Earning Asset* adalah asset bank yang digunakan untuk

¹⁴ Pusat Pembiayaan Pertanian, *Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syariah Untuk Usaha Sektor Pertanian*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h. 1

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 88.

¹⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azka Publisher, 2009), hlm, 63.

menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijaroh*).¹⁷ Sementara itu aset bank yang lain adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *Non Earning Asset* adalah: aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*), pinjaman *qord*, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premise and equipment*).

- c) Bank syariah sebagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain *al-Sharf*, *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya dan *al-Ijaroh*, jenis kegiatan ini antara lain menyewakan kontan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*costudian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan dan bagi hasil.

Prospek pembiayaan syariah secara umum sangat baik. Banyak faktor yang mendukung argumentasi ini, antara lain: (1) prospek

¹⁷ *Ibid*, hlm. 63.

pertumbuhan ekonomi makro Indonesia semakin membaik di masa-masa yang akan datang, (2) potensi perbankan syariah menjadi semakin sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM, (3) semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syariah, (4) keyakinan semakin tinggi bahwa sistem ekonomi syariah lebih memberikan nafas segar keadilan.

Indonesia memiliki potensi ekonomi dari bidang pertanian yang sangat besar. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan kondisi biofisik lahan (fisiografi, bentuk wilayah, lereng dan iklim), luas potensi lahan basah yang belum digarap adalah 16,7 juta hektar. Sedangkan untuk lahan kering masih tersisa lahan potensial seluas 22,3 juta hektar (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005). Namun, potensi yang besar tersebut tidak dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sebagai negara agraris, Indonesia mengimport beras, sayur-sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2011, Indonesia mengimpor beras sebanyak 800.000 ton, dari Vietnam sebanyak 500.000 ton dan dari Thailand sebanyak 300.000 ton. Hal ini adalah tantangan bagi semua pihak untuk dapat memanfaatkan potensi ketersediaan lahan yang sangat luas tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁸

¹⁸ <http://fajar14ek.blogstudent.mb.ipb.ac.id/tugas-kuliah/konsep-syariah-dalam-mengelola-bisnis-pertanian/> diakses tgl.02 September 2017 Pkl.12.00WIB

Strategi dapat ditempuh guna memperbesar peranan lembaga keuangan syariah yaitu mendorong fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah melalui dua aspek yaitu kelembagaan keuangan syariah dan petani. Dari aspek lembaga keuangan syariah antara lain: penyediaan portofolio penyaluran kredit untuk sektor agribisnis terutama untuk usaha mikro dan kecil, menyediakan berbagai macam alternatif pola pendanaan syariah berdasarkan subsektor (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan). Dari aspek petani, dapat diberikan pembinaan petani sebagai nasabah, pengkajian bentuk-bentuk skim pembiayaan syariah yang dapat melayani sektor perkebunan serta sosialisasi pola pembiayaan syariah untuk sektor perkebunan kepada para petani dan pelaku agribisnis yang lain.¹⁹

2. Pengertian Pembiayaan

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan “penghisapan” dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi

¹⁹ Pusat Pembiayaan Pertanian, Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syariah Untuk Usaha Sektor Pertanian, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007) h.4

antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak *Mudharabah*, *Musyarakah* dan yang lainnya.

Di samping itu bank syariah juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para deposan atau pembebanan suatu bunga dari arah nasabah tidak muncul.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi²⁰. Aspek syar'i artinya setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsure maisir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal), sedangkan aspek ekonomi, berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Pembiayaan dan aktivitas bisnis selalu berkaitan. Bisnis merupakan aktivitas yang menjuru pada peningkatan nilai lebih melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan

²⁰ Muhammad Mujahidin “ *Manajemen Pembiayaan Syariah*” artikel diakses pada tanggal 23 Januari 2011 dari <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah>

barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan roda bisnisnya pastinya memerlukan modal ataupun dana tambahan.

Hal itu disebabkan pelaku bisnis tidak memiliki modal hanya keahlian saja atau pelaku bisnis tidak memiliki modal yang cukup, sehingga pelaku bisnis akan berhubungan dengan pihak lain, misal bank, untuk mendapatkan dana segar sebagai suntikan untuk menjalankan bisnisnya, dengan melakukan pembiayaan.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang dua hal yang saling berkaitan, maka perlu dibahas secara singkat, guna lebih dimengerti.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri guna menilai keuntungan seoptimal mungkin.²¹

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²²

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syari'ah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Ketentuan

²¹ Antonius, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta : LPPBS, 1993) h.35

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

Bank Indonesia, aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, gadai, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Untuk dapat merincikan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu:

- a) Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
 - 2) Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / *investaris*.
 - 3) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).
- b) Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:
 - 1) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodic yang telah ditentukan misalnya bulanan.

- 2) Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
 - 3) Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
- c) Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :
- 1) *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
 - 2) *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode.
 - 3) *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).
- d) Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam :
- 1) Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun
 - 2) Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun
 - 3) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

- 4) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan
- e) Berdasarkan Sektor Usaha yang Dibiayai :
- 1) Pembiayaan sektor perdagangan (contoh : pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)
 - 2) Pembiayaan sektor industri (contoh : *home industri*; konfeksi, sepatu)
 - 3) Pembiayaan *konsumtif*, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor, mobil dll.)²³
- f) Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah melalui :

- 1) Transaksi berdasarkan prinsip jual beli:

Murabahah; adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Istishna*; adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. *Salam*; adalah

²³ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), hal. 3

pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka, dan jual beli lainnya.

2) Transaksi berdasarkan prinsip sewa menyewa:

Ijarah; adalah akad pemindahan hak guna atas barang/jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. *Ijarah muntahiyah bittamlik*; adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan di tangan penyewa.

3) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil:

Mudharabah; adalah *Musyarakah*; adalah ,bagi hasil lainnya.

4) Pembiayaan dengan berdasarkan prinsip jasa:

Rahn; adalah menahan salah satu harta si milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Harta tersebut memiliki nilai ekonomis. *Qardh*; adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. *Hiwalah*; adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. *Kafalah*; adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan bank syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.²⁴

²⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal 87

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²⁵

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²⁶

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

*Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*²⁷

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005) hal. 304.

²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 160

²⁷ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.²⁸

Secara umum tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

²⁸ Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Cirebon : STAIN Press, 2009) h. 68

e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan.

Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan enyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang *esensial*, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan *debitur* mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan *debitur*. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank.

Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini

pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri.

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Sistem yang dijalankan Bank Syariah sesuai dengan sistem syariah dengan tidak memasukkan unsur-unsur gharar dan ribawi.
- b. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- c. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- d. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.²⁹

4. Agribisnis

a. Pengertian Agribisnis

Pengertian agribisnis dapat dijelaskan dari unsur kata yang membentuknya yaitu “agri” yang berasal dari kata *agriculture* (pertanian) dan “bisnis” yang berarti usaha. Jadi “agribisnis” adalah usaha dalam bidang pertanian. Baik mulai dari produksi, pengelolaan, pemasaran, atau kegiatan lain yang berkaitan. Menurut Sjarkowi dan

²⁹ Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, h.168

Sufri, agribisnis adalah setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi perusahaan input pertanian dan atau perusahaan pengelolaan hasil pertanian. Sedangkan menurut Austin, agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan usahatani, pengolahan bahan makanan, usaha sarana dan prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, kestabilan pangan dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk distribusi bahan pangan dan seratan³⁰ kepada konsumen.

b. Sistem Agribisnis

Sistem agribisnis merupakan kesatuan atau kumpulan dari elemen agribisnis yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama, menggunakan input dan mengeluarkan output produk agribisnis melalui pengendalian proses yang telah direncanakan. Secara konseptual sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktifitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem³¹ yaitu:

1) Subsistem Agribisnis Hulu

Meliputi pengadaan sarana produksi pertanian antara lain bibit, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, dan peralatan produksi pertanian.

³⁰ *Pengertian Agribisnis Menurut Para Ahli*, <http://www.nasrulartaanatobratnisji.co.id>, (Diakses pada 30 Maret 2018)

³¹ *Pengertian Sistem Agribisnis*, <http://www.klikbbm.co.id>, (Diakses tanggal 30 Maret 2018)

2) Subsistem Usahatani/Produksi

Kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu untuk menghasilkan produk pertanian primer. Termasuk dalam subsistem ini adalah usaha tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, tanaman obat-obatan dan tanaman hortikultura.

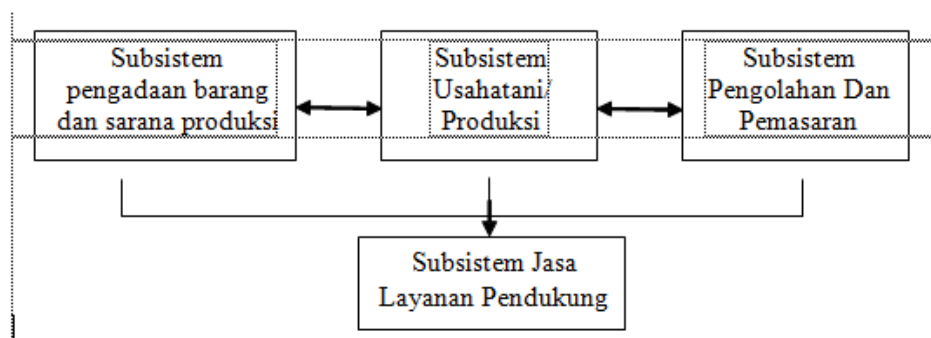
3) Subsistem Agribisnis Hilir

Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usahatani, mengolah produk primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir dan pendistribusian.

4) Subsistem Jasa Layanan

Subsistem jasa layanan agribisnis adalah semua jenis lembaga yang mendukung dan mengembangkan subsistem hulu, subsistem usahatani, dan subsistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, konsultan, keuangan dan penelitian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Sistem agribisnis

Subsistem-subsistem tersebut saling berkaitan satu sama lain. Subsistem agribisnis hulu membutuhkan umpan balik dari subsistem usahatani agar dapat memproduksi sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan budidaya pertanian. Sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan operasi subsistem usahatani bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hilir. Selanjutnya, proses agribisnis hilir bergantung pada pasokan komoditas primer yang dihasilkan oleh subsistem usahatani. Subsistem jasa layanan pendukung, seperti telah dikemukakan, keberadaannya tergantung pada keberhasilan ketiga subsistem lainnya.

B. Kerangka Pemikiran

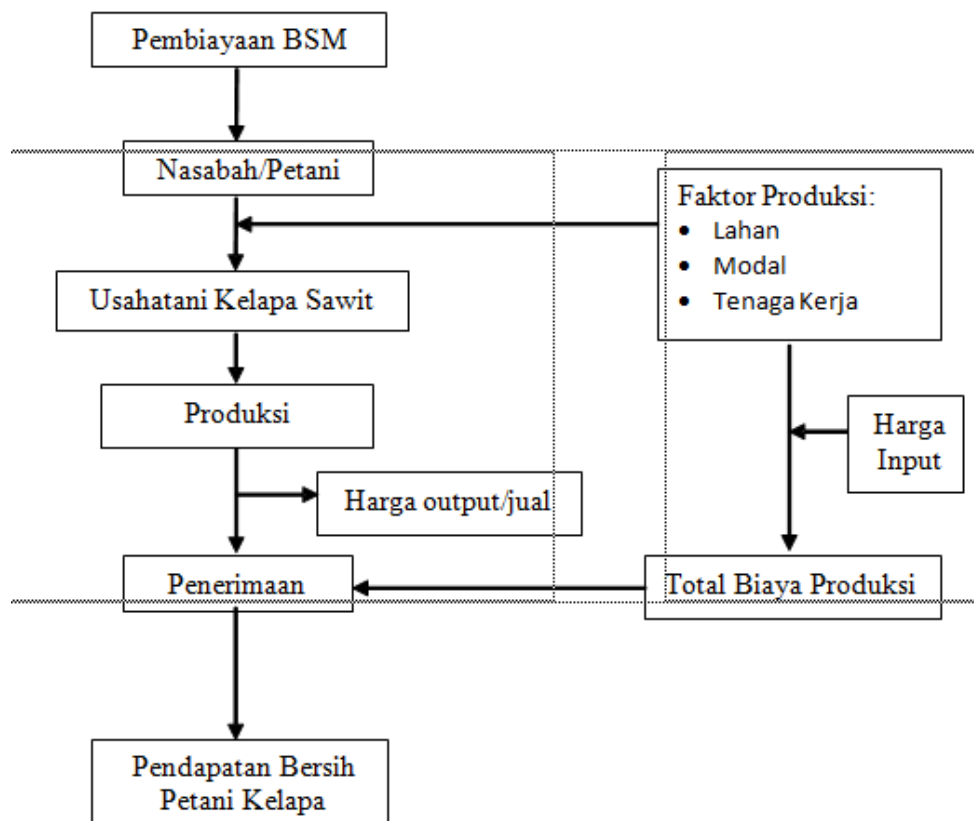
Petani dalam mengusahakan usaha taninya menggunakan beberapa faktor produksi seperti lahan, modal baik berupa bibit, pupuk, pestisida dan peralatan, dan tenaga kerja untuk memperoleh hasil dan keuntungan. Dalam usahatani kepemilikan lahan yang merupakan salah satu faktor produksi umumnya sangat mendukung untuk pengembangan usahatani tersebut. Hal ini dikarenakan, semakin luas lahan yang dimiliki oleh petani maka semakin besar potensi petani untuk mengembangkan usahatannya.

Modal juga sangat berperan besar dalam pembiayaan usahatani terutama untuk pengadaan sarana produksi. Modal didalam usahatani biasanya digunakan untuk pembelian berbagai sarana produksi seperti pupuk, pestisida, serta upah tenaga kerja didalam produksi akan sangat berpengaruh pada proses produksi, karena proses produksi akan membutuhkan input produksi

berupa fisik kemudian dibayar dalam bentuk uang /upah, yang disebut dengan total biaya produksi.

Modal dalam usahatani mempunyai peluang dari beberapa instansi seperti Bank. Fasilitas yang ada pada perbankan dimungkinkan dapat meningkatkan produktifitas usahatani.

Dapat dilihat dalam skema kerangka pemikiran pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Idris tahun 2016 “ Sistem Bagi Hasil Pada Pertanian Karet Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Roburan Lembang Madina”. Skripsi ini membahas

pengaruh bagi hasil terhadap pendapatan petani yang diterapkan petani karet di desa Roburan Lombang Madina. Pola bagi hasil pertanian karet ini memiliki pengaruh yaitu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan masih bisa *saving* untuk keperluan masa depan.

2. Penelitian yang dilakukan Siti Sarah Anjani “Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian Pada KBMT Ibaabdurrahman Ciawi, Bogor, 2013. Skripsi ini membahas efektivitas pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman berdasarkan hasil penilaian responden. KBMT Ibaadurrahman berperan penting dalam pengembangan usaha para nasabah, diantaranya membantu menyediakan permodalan usaha, meningkatkan motivasi berusaha, meningkatkan kesejahteraan nasabah yang dapat dilihat dari peningkatan tabungan, aset rumah tangga, dan skala usaha. Efektivitas pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif.
3. Penelitian yang dilakukan Ibnu Ubaedillah tahun 2011 “efektivitas pembiayaan agribisnis bank syariah dalam pemberdayaan petani (studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat)”. Skripsi ini membahas pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat efektif dalam memberdayakan petani. Kemudian tantangan yang dihadapi standar operasionalnya, PT. Bank Muamalat harus berani menggandeng bapak angkat yang memiliki standar operasionalnya bagus, karena bank tidak memiliki keahlian langsung dalam bidang tersebut. Dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah (regulasi) terhadap pajak

misalnya, harusnya pemerintah pro terhadap sektor ini. Dan berdasarkan parameter transformasi $Y^T = 0,931$ menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat dapat dikatakan efektif.

Nasabah yang diteliti pada skripsi ini adalah petani kelapa sawit yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri. Nasabah tersebut bukan merupakan KUD karena prosedur pembiayaan yang digunakan adalah bilateral, yaitu Bank Syariah Mandiri menyentuh para petani langsung, tanpa ada agen-agen yang berbentuk KUD, atau bapak angkat. Karena pola yang digunakan bukan intiflasma, kerja sama tiga pihak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah : Untuk mengetahui pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan terhadap pengembangan petani kelapa di Desa Teluk Kelasa.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

- 1) Tempat : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan, Jl. M. Boya No.4 Tembilahan Kota dan Masyarakat Petani Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Provinsi Riau.
- 2) Waktu : Penelitian dilakukan pada tanggal 16 April - 08 Juni 2018.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam objek penelitian. ³²Jenis pelaporan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Proses analisa dimulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data yang didapat secara seksama, selanjutnya dari proses analisa tersebut penulis

³²Moeloeng Lexy J, *Metode Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada Karya, 2002), h. 9.

mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber terkait adalah berupa jawaban wawancara yang di lakukan pada salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan dan masyarakat petani Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Provinsi Riau.

Data Sekunder, Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-litelatur kepustakaan seperti buku, dan media tulis jurnal. Sumber data sekunder pada penelitian ini di dapat dari salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan, serta media elektronik yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan penulis Gunakan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Salah satu hal yang dilakukan dalam penelitian yaitu mempelajari beberapa litetur tertulis baik yang bersumber pada buku, jurnal, makalah, artikel, koran dan internet, maupun dari sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang dihimpun dari berbagai tempat.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini dan menanyakan langsung dengan narasumber dari Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian ini, serta mempelajari dokumen-dokumen.

c. Observasi

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung mengenai pembiayaan agribisnis di Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan serta problematika penerapannya di Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang.

Teknik ini di ambil untuk mendeskripsikan data-data yang penulis kumpulkan, baik berupa data dari hasil wawancara, studi kepustakaan, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan.

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti tidak di harapkan dan tidak di anjurkan memelihara asumsi serta keyakinan bahwa dirinya sangat tahu tentang fenomena yang hendak di kaji. Jadi, tidak lazim untuk meyakinkan diri dan orang lain bahwa dirinya sangat tahu dan

tidak mengetahuinya. Seorang peneliti lebih berada pada posisi sebagai orang belajar di masyarakat, bukan belajar tentang masyarakat. Karena itu, ia sesungguhnya merupakan orang yang tidak tahu tentang yang tidak diketahuinya.³³

F. Teknik Pengolahan data

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah proses pengolahan data dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara, mengedit data, kemudian mengkalsifikasikan data sesuai masalah atau tema yang dibahas serta menghitung data-data berupa angka-angka.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh, kemudian menjabarkan data-data agar mendapatkan gambaran yang jelas dan pada akhirnya penulis melakukan analisa deskriptif terhadap data tersebut.

H. Pemeriksaan keabsahan data

Peneliti menjelaskan bagaimana proses dan teknik yang di gunkana untuk keabsahan data yang mencakup kredibilitas, dependabilitas,

³³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), Ed. 1 Cet VII, hlm. 43-49.

transferabilitas, dan konfirmabilitas dan dapat dengan hanya triangulasi, baik triangulasi sumber maupun waktu.

a. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat di percaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Sebab dari perspektif ini bertujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

b. Transferabilitas (*transferability*)

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat di generalisasikan atau di transfer. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian tersebut.

c. Dependabilitas (*dependability*)

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang di lakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

d. Konfirmabilitas (*confirmability*)

Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang di konfirmasikan oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengoreksi dan mengoreksi seluruh data penelitian.

I. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan pedoman teknis penyusunan Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan³⁴

Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT.

³⁴ Company profile Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan

Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah.

Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang.

Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Demikian uraian singkat Sejarah Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang kehadiran sejumlah perbankan syariah di tanah air.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pimpinan ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur Organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan yang disusun dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana intinya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati. Secara Umum Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri.

Kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pimpinan ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh

fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Struktur Organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan yang disusun dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana intinya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati.

Berikut struktur organisasi di PT. BANK SYARIAH MANDIRI beserta tugasnya :

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi di PT. BANK SYARIAH MANDIRI adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Cabang Pembantu
 - a) Bertanggung jawab pada kantor cabang tentang jalannya kantor cabang pembantu
 - b) Mengambil keputusan atas semua kegiatan dibidang pemasaran, operasional, sampai dengan batas wewenangnya di kantor cabang pembantu
 - c) Membantu kualitas aktiva produktif dan mengupayakan kolektibilitas lancar minimal sama dengan target yang telah ditetapkan direksi
 - d) Bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan yang baik bagi seluruh nasabah dengan tetap terlaksananya. Bertanggung jawab terlaksananya pengamanan, administrasi dan pemeliharaan kekayaan yang ada di kantor cabang. sistem dan prosedur yang berlaku.

2) Manajer Marketing

- a) Membantu pimpinan cabang dalam mengelola melaksanakan operasional cabang dalam bidang pemasaran sistem syariaah dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.
- b) Membuat rencana kerja tahunan bisang pendanaan,pmbiayaan, jasa jasa dan usaha
- c) Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
- d) Melakukan penilaian prestasi pegawai, mengusulkan kenaikan/penurunan gaji, pangkat, jabatan pegawai bawahannya. Dan mengusulkan pemberian penghargaan/hukuman untuk pegawai bawahannya.
- e) Bertanggung jawab pada pimpinan cabang.

3) Manajer Operasional

- a) Mengkoordinir dan membawahi kepala bagian sebagai struktur organisasi
- b) Turut bertanggung jawab terhadap terlaksanaannya pengolaan operasional kantor cabang secara baik
- c) Memberikan pertimbangan serta usul konkrit kepada pimpinan cabang untuk mengembangkan cabang
- d) Dapat mewakili pimpinan cabang jika pimpinan cabang berhalangan.
- e) Bertindak utuk dan atas nama pimpinan cabang untuk menanda tangani surat berharga, surat keluar atau masuk berdasarkan surat

kuasa yang diterima bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi

- f) Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.
- 4) Marketing Officer
- a) Membantu pencairan dana
 - b) Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan
 - c) Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalannya kesuksesan pemberian kredit kepada masyarakat.
- 5) Account Asisten Officer
- a) Bertanggung jawab kepada marketing officer
 - b) Membantu segala pekerjaan marketing officer atau persetujuan dari marketing officer
- 6) Customer Service
- a) Melayani permintaan buku cek
 - b) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan dengan permohonan investor
 - c) Memberikan penjelasan pada nasabah mengenai produk Bank Syariah Mandiri berikut syarat maupun tata cara prosedurnya.
 - d) Melayani penutupan rekening giro, baik atas permintaan sendiri, ketentuan bank yang telah disepakati investor maupun karena peraturan Bank Indonesia.
 - e) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pembukaan (stop payment) baik rekening maupun tabungan.

7) Teller

- a) Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat
- b) Bersama-sama dengan manajer operasional membuka atau menutup brankas/khasanah, mengambil atau menyimpan uang tunai dari atau kedalam brankas.
- c) Membuka atau posting muatsi kas secara benar
- d) Bertanggung jawab atas kesesuaian jumlah penyetoran/penarkannasabah, anatar jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka dan jumlah uang tuna/warkat setoran serta data yang direkam dalam komputer cabang.

8) Back Office

- a) Bertanggung jawab kepada manajer operasional.
- b) Memastikan kliring berjalan.
- c) Pencairan deposito
- d) Penyetoran pajak.

b. Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah

VISI

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia

MISI

- Mewujudkan pertumbuhandan keuntungan di atas rata rata industri yang berkesinambungan.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.

- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

Penjelasan tentang visi :

Visi adalah kondisi masa depan BSM yang diinginkan, yang mengandung core ideology yang ingin dipertahankan dan envisioned future yang ingin diwujudkan di tahun 2020.

- 1) Core ideology adalah BSM spiritual foundation yang mendefinisikan alasan keberadaan BSM. Bunyi core ideology atau BSM spiritual foundation adalah “Bismillah, kami berlomba membangun peradaban ekonomi yang mulia.
- 2) Visioned future adalah aspirasi yang ingin BSM capai pada beberapa tahun ke depan (d.h.i. tahun 2020) yaitu menjadi top 8 di perbankan nasional atau top 3 di perbankan syariah ASEAN di segi aset, dan memiliki tingkat profitabilitas tertinggi ke-3 di antara perbankan nasional. BSM akan menjadi yang terdepan dalam mengembangkan peradaban ekonomi umat manusia yang lebih luhur, adil, terhormat, sejahtera-menyejahterakan, sesuai syariah, bernilai tinggi, dan unggul.

Penjelasan tentang misi :

No	Misi	Penjelasan
1	Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata rata industri yang berkesinambungan	Bahwa pertumbuhan dan keuntungan BSM selalu di atas rata rata industri yang dicapai dengan strategi pengelolaan yang mengutamakan SCA (sustainable competitive advantage)
2	Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM	Bahwa BSM mengutamakan penghimpunana dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
3	Mengembangkan manajemen talenta dari lingkungan kerja yang sehat	Bahwa BSM terus menerus mengembangkan pengelolaan talenta BSM mulai tahap attraction,identification,development,s/d retention,dan lingkungan kerja yang sehat.
4	Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	Bahwa BSM terus menerus berupaya menebar manfaat pada masyarakat dan lingkungan yang meningkat dari waktu ke waktu
5	Mengembangkan nilai nilai syariah universal	Bahwa BSM berkomitmen untuk mengembangkan tata kelola berdasarkan ilmu pengetahuan dan nilai nilai

	kemanusiaan yang diterima masyarakat secara universal..
--	---

2. Profil Kabupaten Indragiri Hilir³⁵

a. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Merasa persyaratan Administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom) Setelah melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, maupun oleh Departemen Dalam Negeri. Maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau (propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai daerah persiapan Kabupaten Indrgiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / Daerah Tingkat II. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1965). Maka Daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Daerah ini terletak dibagian selatan Propinsi Riau dengan luas wilayah 11.605,97 Km². Karena letak posisi

³⁵ Marliah Tri, Skripsi: “Analisis Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir” (Yogyakarta: UIN SUKSA RIAU, 2011), Hal. 38.

Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339,5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km. Dengan kondisi ini maka Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai potensi yang luas, terutama dibidang perikanan.

Sebagai daerah pasang surut, maka terdapat sungai cukup banyak dengan penyebaran sungai hampir seluruh Kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada pasang surut, kondisi ini melengkapi spesifikasi wilayah dengan sebutan *"Negri Seribu Parit"*.

Prospek pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi karena berada dipantai Timur Sumatra dan berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan Karimun, berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai *"Pintu Gerbang Pantai Timur sumatra"* dalam berbagai aktifitas pembangunan.

b. Letak dan Luas wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1965 Tanggal 14 Juni 1965 (LN RI Nomor 49). Secara Fisiografis sebagian wilayahnya merupakan daerah dataran rendah yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan gambut, daerah payau dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil lainnya merupakan dataran tinggi berbentuk bukit-bukit dengan ketinggian 5 meter s/d 35 dari permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir terhampar dibagian selatan Provinsi Riau pada posisi:

0°36' : Lintang Utara.
1°07' : Lintang selatan.
104°10' : Bujur Timur dan
102°32' : Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

- 1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit-parit dengan menggunakan kendaraan speedboat maupun pompong dan perahu. Di antara sungai-sungai yang utama di Daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Visi sebagai berikut
"Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025"

Untuk merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Lima Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir kedepan yakni:

1. Mewujudkan daya saing Daerah
2. Mewujudkan suasana bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah yang demokratis
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
4. Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya
5. Mewujudkan Daerah yang memiliki peran penting pada tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

Adapun jarak antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Jarak Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Ibukota Kabupaten	Ibukota Kecamatan	Jarak
1	TEMBILAHAN	Kota Baru	165
		Selensen	175
		Pulau Kijang	101
		Benteng	85
		Enok	88
		Kuala Enok	53
		Sapat	23
		Concong	18
		Tembilahan	0
		Tembilahan Hulu	1
		Sungai Salak	40
		Harapan Tani	15
		Sungai Piring	22
		Teluk Pinang	65
		Kuala Lahang	75
		Khairiah Mandah	97
Sungi Guntung	168		
Pelangiran	160		
Saka Rotan	165		
Pulau Burung	170		

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir. 2010

1) Pemerintahan

Pembentukan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No 6 Tahun 1965 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 tahun 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun ini Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah terdiri dari 20 kecamatan, 18 kelurahan dan 175 Desa.

2) Penduduk

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti Daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Dilihat komposisinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki berjumlah 332.824 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 80 jiwa per Km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan 331 jiwa per Km², sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan tingkat kepadatan 24 jiwa per Km².

3) Sosial

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan.

Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

4) Mata Pencaharian Penduduk

Kebanyakan mata pencaharian daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan bertani, berkebun dan sebagai nelayan. Sebagai lahan pertanian (sawah) adalah lahan pasang surut, sedang lahan pertanian (bukan sawah) sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan tegal atau kebun. Sedangkan lahan pertanian sebagian besar atau lebih dari setengahnya adalah hutan Negara. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir juga berkerja sebagai nelayan dan juga sebagai penambak ikan dan jugu udang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2 Sumber potensi dan Tingkat Pemanfaatan Perairan/lahan kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Aspek Sumber daya	Potensi	Pemanfaatan	Tingkat Pemanfaatan
1. Sumberdaya penangkapan –Perairan laut	36.404	32.828,50	89,63
2. Budidaya perikanan			
1. Budidaya air Tawar –Kolam (Ha)	1.657,	122,00 -	7,36 -
2. Budidaya air payau (Ha)	31.600,	1.399,00	4,43
Tambak	00		
Budidaya laut (unit)		-	-
Kejapung	20.000,		
4. Budidaya Pantai (Ha)	00	-	-
Karang			
	2.500,0		

Sumber: Kantor BPS Kabupaten INHIL dalam angka 2010

5) Kondisi Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun kondisi keuangan di Kabupaten Indragiri Hilir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 mengalami kenaikan, Seperti terlihat dalam pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk menjadi Peraturan Daerah APBD tahun anggaran

2010 sebesar Rp 1.184.216.580.246.35 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 160.321.257.672.00. Dimana pada Tahun anggaran 2009 yang lalu total APBD Inhil hanya sebesar Rp 1.023.895.322.574.35. Total APBD tersebut sudah mengalami peningkatan setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dimana saat pengusulan oleh pihak eksekutif totalnya sekitar Rp.1.137.203.799.246.65.

Kenaikan angka tersebut mencapai Rp.13.395.694.989.55. Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun ini mencapai angka Rp 38.377.932.30. Untuk Dana Perimbangan pada awalnya hanya sekitar Rp 1.042.887.281.110.00 setelah melalui pembahasan mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.045.687.281.110.00 atau mengalami kenaikan dari tahun lalu Rp. 152.085.941.024.00. Sementara itu Pendapatan Lainnya Yang Sah dimana pada awalnya hanya sebesar Rp.55.938.585.550.00 setelah mengalami pembahasan di tingkat Banggar menjadi sebesar Rp. 100.151.366.550.00 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai angka Rp. 44,212.781.000.00. Kenaikan angka tersebut mencapai Rp. 13.395.694.989.55. Sementara itu untuk Belanja Tidak Langsung pada APBD Inhil 2010 saat dianggarkan ini mencapai angka Rp. 633.234.147.044.35, setelah dalam pembahasan mengalami kenaikan menjadi Rp. 637.013.193.044.35 atau naik Rp.3.779.046.000.00. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu Belanja Langsung mengalami kenaikan Rp.47.431.068.136.00 dari total anggaran Rp.589.582.124.908.16. Sedangkan untuk belanja langsung pada APBD tahun ini adalah Rp. 637. 561.313.180.00.

Total anggaran tersebut sudah mengalami kenaikan saat dibahas di tingka Banggar yang semula hanya diusulkan Rp. 593.907.578.180.00, atau mengalami kenaikan Rp. 43.653.735.000.00. Anggaran belanja langsung pada tahun ini mengalami kenaikan Rp 180.653.678.480.10 dari total anggaran Rp 456.907.634.699.90.

B. Jumlah Bank Syariah di Kabupaten Indragiri Hilir

Jumlah Bank di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 8 Bank Konvensional dan 1 Bank Syariah.³⁶

NAMA – NAMA BANK DALAM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR			
NO	NAMA BANK	ALAMAT	TELEPON
1	BNI 46	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 78	(0768) 21946
2	BRI	JL. M. BOYA NO. 4	(0768) 21703
3	BANK RIAU	JL. HANG TUAH NO. 01	(0768) 22525
4	BPR	Jl. Abdul Manaf No. 01	(0768) 325628
5	PANIN	JL. M. BOYA NO. 231 – 232	(0768) 324917
6	DANAMON	JL. SULTAN SYARIF QASIM	(0768) 24688
7	MEGA	Jl. M. Boya Tembilahan	(0768) 21601
8	Bank MANDIRI Syariah	Jl. M. Boya tembilahan	(0768) 21935, 21936, 2193
9	Bank MANDIRI	Jl. M. Boya tembilahan	

³⁶ <http://home.inhilkab.go.id/bank/> (di akses pada 31 Agustus 2018)

C. Temuan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah di peroleh dari beberapa informan yang telah di pilih selama penelitian berlangsung. Selain itu juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Adapun dari penelitian yang telah di lakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan jasa layanan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan merupakan solusi bagi produktifitas petani yang terlihat dari hasil wawancara dan observasi di mana proses pembiayaan sektor agribisnis ada dalam beberapa produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan.

Secara teknis, proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan terhadap pelaku usaha agribisnis seperti pembiayaan modal usaha yang ditawarkan pada pelaku usaha agribisnis, akan tetapi terkait dengan temuan penelitian melalui hasil questioner yang di sebar ke beberapa masyarakat petani Desa Teluk Kelasa yang sedang atau pernah menggunakan jasa layanan keuangan perbankan hanya sebatas pada fasilitas transfer uang dan simpanan tetapi pada segi pembiayaan masyarakat petani Desa Teluk Kelasa belum mendapat sosialisasi dalam hal tersebut sehingga tidak ada yang pernah menggunakan layanan pembiayaan modal usaha di Bank Mandiri Syariah KCP Tembilahan maupun Bank Syariah lainnya.

Merujuk pada hasil penyajian data yang peneliti sajikan pada sub fokus sebelumnya. Saat ini secara mendetail dan sistematis dapat peneliti

sampaikan temuan-temuan apa saja yang di peroleh dari hasil penyajian data tersebut,dengan fokus penelitian.

- Jasa layanan pembiayaan pada Bank Syariah merupakan solusi bagi produktifitas petani
- Bank Syariah mempromosikan produk dan jasa layanan keuangannya pada para petani di Indragiri Hilir

Berikut merupakan hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan layanan pembiayaan agribisnis serta pemasaran produk pembiayaan agribisnis pada petani.

1. Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Petani Kelapa

Data pembiayaan perbankan syariah pada sektor pertanian termasuk perburuan dan kehutanan posisi akhir Februari 2016 tercatat sebesar Rp 7,83 triliun atau sekitar 3,71% dari total pembiayaan sebesar Rp 211,57 triliun. Perbankan syariah yang memiliki keanekaragaman akad memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam sektor usaha pertanian.³⁷

Pembiayaan syariah ke pertanian dan perkebunan perlu disubsidi. Subsidi tersebut dinilai dapat melindungi penyaluran pembiayaan perbankan syariah di dua sektor tersebut. Jika instrumen itu ada dan pemerintah mampu memberikan regulasi terhadap instrumen tersebut,

³⁷ OJK dorong bank syariah beri pembiayaan pertanian, *keuangan.kontan.co.id* (Diakses pada 2 Mei 2018)

maka produk-produk keuangan syariah mudah terserap di pasar dan hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor riil.³⁸

Langkah strategis tersebut bisa menjadi alat bank syariah untuk lebih fokus pada sektor riil. Pasalnya, selama ini pembiayaan sektor riil belum sepenuhnya dikuasai oleh lembaga keuangan syariah. Meskipun ada, masih terbatas pada jasa dan perdagangan. Pembiayaan pertanian dan perkebunan merupakan sektor riil yang besar, dan pasar belum sepenuhnya dikuasai oleh bank syariah.³⁹

Bank Syariah Mandiri punya komitmen membiayai sektor agribisnis. Namun keterbatasan jaringan menjadi kendala utama BUS dan UUS masuk ke sektor pertanian. Bank Syariah Mandiri serius menggarap sektor agribisnis. Bagi Bank Syariah Mandiri sektor pertanian menjadi salah satu prioritas khususnya untuk segmen UMKM. Jumlah pembiayaan pertanian Bank Syariah Mandiri masih kecil dibandingkan dengan total pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Dari total pembiayaan per Januari 2012 yang mencapai Rp 36,5 triliun, sektor pertanian hanya berkontribusi Rp 1,3 triliun. Pembiayaan tersebut tersebar untuk perkebunan dan pertanian. Sebagian besar masih terserap ke perkebunan kelapa.⁴⁰

Pola pembiayaan Bank Syariah Mandiri untuk sektor perkebunan kelapa selama ini mengandalkan keberadaan perusahaan inti. Perusahaan

³⁸ *Pembiayaan Syariah ke Pertanian dan Perkebunan Perlu Disubsidi*, <https://www.syariahamandiri.co.id> (Diakses pada 2 Mei 2018)

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Bank Syariah Komit Biayai Sektor Agribisnis*, <https://www.syariahamandiri.co.id> (Diakses pada 2 Mei 2018)

ini menjadi penjamin keberlangsungan pasar hasil pertanian dari petani. Jika ada perusahaan yang mau membeli produk petani, Bank Syariah Mandiri akan menyalurkan pembiayaan. Pola tersebut dinilainya merupakan cara yang paling efektif untuk menggerakkan pengusaha besar berbagi dengan para petani. Pola tersebut dinamakan *close financial system*, yang diterapkan karena masalah petani bukan hanya akses modal tapi juga perlindungan pasar.⁴¹

Selain itu, pola pembiayaan melalui perusahaan inti akan memudahkan Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor perkebunan kelapa. Terbatasnya jaringan Bank Syariah Mandiri membuatnya kesulitan untuk mengakses petani hingga ke pelosok. Untuk masuk ke pembiayaan tersebut, bank juga butuh infrastruktur yang lebih banyak. Keberadaan perusahaan inti masih sulit untuk dicari.⁴²

Bank Syariah Mandiri akan menambah pembiayaan ke sektor pertanian sebesar Rp500 Miliar. Dengan tambahan itu, ditargetkan pembiayaan pertanian menjadi Rp1,8 triliun. Penambahan pembiayaan ke pertanian itu diakui tidak agresif. Pasalnya, penyaluran pembiayaan ke pertanian dinilainya cukup sulit. “Naik Rp500 miliar itu saja sudah bagus karena kita susah mencari perusahaan inti yang menjadi

⁴¹ BSM Tambah Pertanian Rp500 M, <https://www.syariahmandiri.co.id> (Diakses pada 2 Mei 2018)

⁴² *Ibid.*

penjamin pembiayaan ke petani-petani,” ungkap Direktur Bisnis Bank Syariah Mandiri Hanawijaya.⁴³

2. Tantangan Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Petani Kelapa

Bank Syariah Mandiri telah berdiri selama 18 tahun terbukti dari eksistensinya sebagai sebuah lembaga keuangan yang dinilai mampu mempertahankan posisinya dan mendapat kepercayaan dari seluruh nasabahnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri baik dalam bentuk kegiatan bisnis (pembiayaan) maupun kegiatan sosial ditujukan bagi semua lapisan masyarakat. Namun, peran tersebut nampaknya masih belum dirasakan oleh petani yang membutuhkan modal untuk meningkatkan pendapatan maupun skala usahanya. Hal ini terbukti dengan minimnya informasi antara petani terhadap Bank Syariah Mandiri menjadikan petani kurang berminat mengajukan pembiayaan. Akibatnya, sektor pertanian menjadi kurang atraktif bagi Bank Syariah Mandiri.⁴⁴

Penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian masih kurang *matching-* dengan *nature* usaha di Bank Syariah Mandiri. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman, dan hasil produksi dan harga yang tidak menentu. Sementara transaksi di perbankan dilakukan secara reguler, misalnya untuk pembayaran angsuran dilakukan per bulan.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Siad Marhalim, *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan, wawancara di Tembilahan, tanggal 18 Mei 2018

⁴⁵ *Ibid.*

Selain itu, pihak Bank Syariah Mandiri belum berani menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian secara optimal. Mereka memiliki pemahaman bahwa pertanian merupakan suatu sektor usaha sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti dan sebagainya.⁴⁶

Perhatian sektor Bank Syariah Mandiri masih terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar dan belum menyentuh para petani menengah dan kecil. Para bankir masih *under estimate* terhadap pelaku usaha pertanian lainnya dan menganggap kelompok ini tidak dapat menawarkan margin keuntungan yang memadai bagi Bank Syariah Mandiri. Karakter perbankan sebagai entitas bisnis cenderung 'mengikuti' dunia usaha. Maksudnya, jika dunia usaha pertanian tidak menarik bagi perbankan, cukup sulit bagi sektor perbankan untuk datang dan memberikan perhatian bagi sektor pertanian khususnya perkebunan kelapa. Akan tetapi di lain pihak, tidak sedikit usaha agribisnis atau sektor pertanian dan perkebunan kelapa skala besar menjadi magnet tersendiri bagi Bank Syariah Mandiri, karena prospek keuntungan yang besar.⁴⁷

Maka dari itu belum adanya sosialisasi yang diadakan oleh pihak BSM KCP Tembilahan pada masyarakat petani di wilayah pelosok seperti masyarakat Indragiri Hilir khususnya yang dalam wawancara pada beberapa petani pelaku usaha kelapa bahwa modal menjadi hal yang penting dalam meningkatkan produktifitas usaha, akan tetapi belum ada

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

pihak seperti Bank yang dapat memfasilitasinya. Ditemukan juga bahwa masyarakat petani sangat minim menggunakan jasa layanan keuangan Bank dengan alasan pengetahuan dan jangkauan.⁴⁸

3. Mekanisme Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Petani Kelapa

Prosedur pembiayaan yaitu mengikuti tahapan proses pembiayaan mulai dari pengumpulan data, verifikasi data, pengajuan MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan), keputusan pembiayaan, realisasi keputusan, pemantauan dan pelunasan.⁴⁹

Pada pengumpulan data, bank harus memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi bank tergolong aman dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut.⁵⁰ Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan *ta' aruf* dan wawancara. *Ta' aruf* adalah proses awal perkenalan antara dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam wawancara tersebut akan diperoleh data-data sementara tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data-data yang diperoleh.⁵¹

Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta konsistensi keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. Data tertulis tersebut sebagai acuan, sebab banyak terjadi perbedaan akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara. Dari data standar itu pula para *Account*

⁴⁸ Wawancara pada masyarakat pelaku usaha kelapa di Indragiri Hilir Selatan-Riau, tanggal 04 Juni 2018

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Manager (AM) bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak.⁵²

Secara garis besar dalam wawancara tersebut harus mencakup kelengkapan data pemohon, data-data pendukung, pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.⁵³

Selanjutnya, memperoleh data nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah yang disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (*call report*), biasanya disebut solitasi.⁵⁴

Dalam menjalankan solitasi, AM harus mempunyai nilai standar tentang informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif.

Adapun standar informasi yang dimaksud adalah :⁵⁵

- a. Informasi umum tentang eksistensi usaha itu sendiri
- b. Informasi kebutuhan nasabah
- c. Informasi kemampuan pembayaran kewajiban (*repayment*)
 - 1) Informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban (*repayment*) dari hasil produksi itu sendiri, cara pemasaran, , strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi yang pernah dicapai, piutang dagang.
 - 2) Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

- d. Informasi jaminan
 - 1) Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik jaminan dan *marketable*.
 - 2) Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada serta jenis dan sifat fisika kimianya.
 - 3) Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi.
- e. Informasi hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan (kredit) sebelumnya dan tujuan penggunaan pembiayaan. Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi perusahaan. Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan maka dapat dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondisi calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama. Dan hasil informasi dibandingkan dengan posisi di neraca dan rugi laba.

Setelah pengumpulan data, pihak bank melakukan laporan kunjungan (*call report/on the spot (OTS)*) adalah laporan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang dibuat oleh AM dan diketahui atasannya, sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya.

Selanjutnya, proses analisis pembiayaan. Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (*first way out*) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (*second way out*) apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan.

Keputusan pembiayaan melalui keputusan komite. Kemudian realisasi keputusan dengan penandatanganan akad pembiayaan dan jaminan. Setelah

itu pemantauan usaha dan pembayaran kewajiban sampai pelunasan hingga pelepasan jaminan. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan pertanian kelapa adalah akad *murabahah*. Pada aplikasinya Bank Syariah Mandiri menggunakan media „*akad wakalah*“ dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut.

D. Pembahasan hasil temuan Penelitian

Menurut Nurmanaf, dkk., beberapa kendala yang dihadapi dalam pendanaan sektor pertanian dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya⁵⁶:

- a. Jangkauan pelayanan kredit/pembiayaan masih sangat terbatas. Bahkan untuk bank tertentu masih ada yang hanya melayani masyarakat sekitar kota kabupaten/kota kecamatan.
- b. Persyaratan aplikasi/pengajuan kredit masih sangat *rigid* sehingga tidak semua masyarakat dapat mengakses pinjaman yang disalurkan. Terlebih lagi untuk sektor pertanian yang dipandang sangat *risky* pihak perbankan cenderung lebih berhati-hati lagi.
- c. Jangka waktu proses pencairan kredit relatif lama karena harus ada *screening* dan *checking*.
- d. Biaya transaksi dianggap masih terlalu besar.
- e. Persyaratan agunan dengan menetapkan barang yang telah memiliki kekuatan hukum formal (sertifikat/BPKB) dirasa masih cukup memberatkan.

⁵⁶ Nurmanaf, et. al., *Analisis Sistem Pebiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2006)

- f. Penilaian terhadap nilai agunan cenderung sangat *underestimate* sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai pinjaman yang diberikan.

Sementara itu, menurut Aviliani, beberapa kendala yang dihadapi dalam pendanaan sektor pertanian dapat dilihat dari berbagai segi⁵⁷:

- a. Risiko *on Farm*, yaitu yang terjadi dalam budidaya tanaman seperti ketersediaan pupuk, bibit, pestisida dan teknik budidaya.
- b. Risiko Pemasaran, yaitu risiko yang terjadi karena kesulitan pemasaran produk pertanian sehingga menimbulkan risiko penurunan harga atau tidak terserapnya produk hasil pertanian
- c. Masalah Sosial, masalah penjarahan atau ketimpangan sosial antara petani dengan perusahaan
- d. Risiko status lahan, status tanah menyulitkan sebagai agunan kredit, masalah sertifikasi tanah prosesnya lama dengan *timing* pemberian kredit menjadi berkepanjangan
- e. Dominasi usaha mikro kecil yang memiliki kelemahan dalam manajemen, pembukuan, distribusi pemasaran, permodalan dan agunan.
- f. Ketergantungan kepada industri hilir sangat tinggi yang mengakibatkan *bargaining power* (daya tawar) petani rendah,
- g. Keterbatasan kompetensi bank di bidang pertanian. Jumlah bank yang mempunyai kompetensi di sektor pertanian masih terbatas, sehingga belum semua bank mempunyai keberanian membiayai sektor pertanian.

⁵⁷ Aviliani, *Kebijakan Perbankan dalam Sektor Agribisnis. Makalah disampaikan pada Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian*. (Jakarta: Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB, 2009)

Dari sisi perbankan, rendahnya alokasi kredit disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:⁵⁸

- a. Perbankan memandang sektor pertanian sangat *risky* sehingga sangat hati-hati dalam pemberian pembiayaan
- b. Pihak perbankan ada yang trauma dengan pengalaman KUT yang kurang baik
- c. Banyak perbankan yang tidak mempunyai cukup pengalaman menyalurkan kredit di sektor pertanian
- d. Dominasi usaha mikro-kecil memiliki kelemahan dalam manajemen dan pembukuan (*nonbankable*)
- e. Adanya risiko sosial dan status lahan yang kurang kondusif bagi perbankan.

Sementara di sisi lain, pelaku usaha pertanian (petani, pedagang saprodi/output pertanian) memiliki *image* bahwa meminjam modal di perbankan sangat kompleks prosedurnya, sehingga kurang terdorong untuk mengajukan kredit. Penyediaan agunan merupakan persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha pertanian. Perbedaan *nature* usaha, minimnya informasi serta belum optimalnya komunikasi antara sektor pertanian dengan perbankan juga menjadi kendala yang tidak kalah penting untuk dicarikan solusinya yang tentu saja harus menguntungkan kedua pihak.⁵⁹

Hasil studi menunjukkan bahwa minimnya pembiayaan di sektor pertanian oleh perbankan disebabkan beberapa hal, diantaranya: risiko

⁵⁸ Ashari, *Peran Perbankan Nasional Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Di Indonesia* (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2009), h.25

⁵⁹ *Ibid.*

pembiayaan yang tinggi, persyaratan yang ketat dalam pengajuan kredit, kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil, serta keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian.⁶⁰

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian, diantaranya dengan memperbesar alokasi anggaran ke sektor pertanian, peningkatan efektivitas dana APBN, mendorong perbankan lebih ekspansif dalam pembiayaan pertanian, maupun merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik pertanian.⁶¹

Walaupun pemerintah telah berupaya untuk mencoba mengembangkan pembiayaan pertanian ini secara serius, akan tetapi permasalahan klasik yang membelit skema pembiayaan pertanian belum dapat diurai secara baik, sehingga perlu dirumuskan jalan keluarnya yang efektif.⁶²

Belum optimalnya dukungan perbankan dalam alokasi pembiayaan ke sektor pertanian merupakan tantangan bagi pemerintah, pelaku usaha pertanian dan pihak perbankan untuk dicari solusinya. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam regulasi seyogyanya memiliki keberanian untuk membuat terobosan kebijakan di sektor perbankan yang lebih pro pertanian dan usaha mikro kecil di perdesaan. Terkait dengan masih sulitnya pelaku usaha pertanian (terutama petani) akibat kendala persyaratan *collateral*, pemerintah dapat membantu dengan fasilitasi program

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Arifin B., Mengatasi Kesulitan Pembiayaan Sektor Pertanian
<http://barifimultiply.com/journal/item/17> (diakses 23 Agustus 2018)

sertifikasi lahan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu juga menyusun buku pintar komoditas yang membahas secara lengkap dan proporsional “*a to z*” terkait dengan komoditas pertanian. Hal ini dimaksudkan agar dengan buku tersebut dapat dijadikan panduan dalam pengembangan bisnis bank, misalnya bagi *account officer* (AO) dan pengambil keputusan perbankan ketika melakukan persetujuan pembiayaan.⁶³

Pelaku usaha di sektor pertanian juga harus membuat terobosan dan langkah-langkah kongkret agar sektor pertanian “laku jual” dan memang layak diberikan dukungan dana yang memadai. Profesionalitas dan integritas moral pelaku usaha pertanian harus menjadi prioritas untuk segera dibenahi. Ibaratnya uang akan mengalir ke tempat yang paling menguntungkan masih menjadi praktisi perbankan. Artinya perbankan akan secara otomatis mengalokasikan dana pada usaha-usaha yang memiliki ekspektasi paling menguntungkan.⁶⁴

Pelaku perbankan diharapkan juga lebih proporsional dan tidak apriori terhadap pembiayaan di sektor pertanian. Dengan luasnya cakupan usaha, komoditas, skala usaha, maupun karakteristik pelaku di sektor pertanian diharapkan memunculkan upaya-upaya terobosan dalam penyusunan skim pembiayaan sesuai dengan pelaku usaha pertanian yang beragam tersebut. Untuk itu, perlu upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan pemahaman terhadap sektor pertanian yang lebih baik bagi petugas analisis pembiayaan/*account officer* di setiap perbankan. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan mengadakan

⁶³ Ashari, *Peran Perbankan*, h. 25

⁶⁴ *Ibid.*

seminar/*workshop/training* bagi *banker* tentang segala aspek terkait dengan sektor pertanian beserta prospek pembiayaan di sektor tersebut.⁶⁵

Implikasi dari penggunaan akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.⁶⁶

Dengan adanya akad *wakalah* tersebut bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad *wakalah* kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram.⁶⁷

Selain itu dalam aplikasinya akad jual beli *murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini tentunya

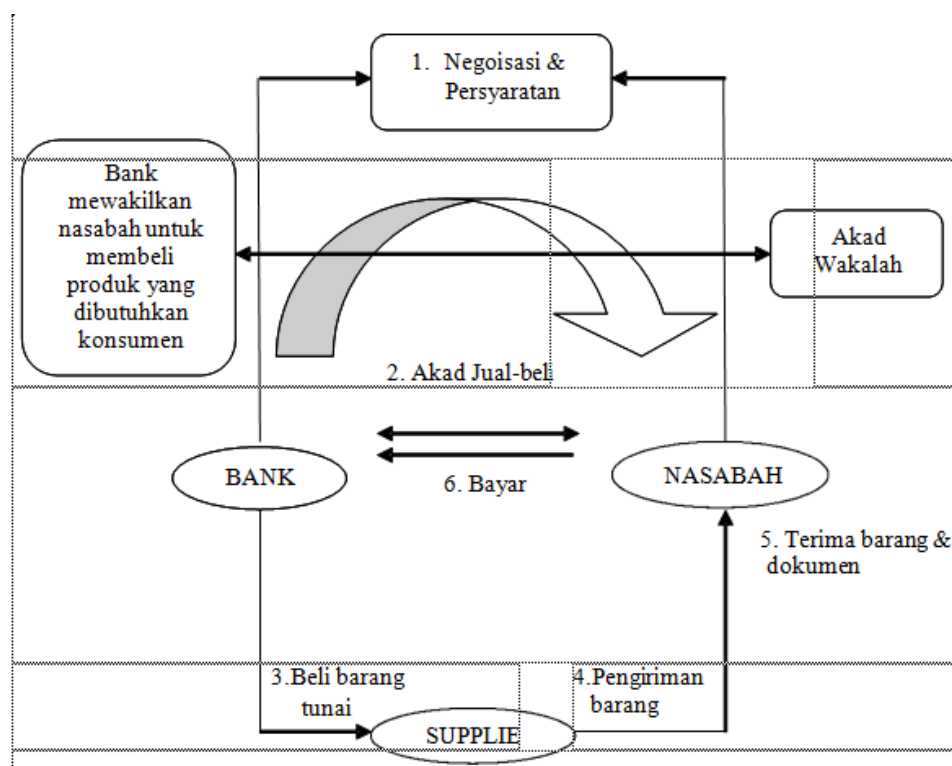
⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*, Jebi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, h. 157

tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁶⁸ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1.⁶⁹

Skema Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah Mandiri pada Petani Kelapa



Gambar 4.1 Skema *Murabahah wal Wakalah*

Wiksuana menyatakan bahwa modal menjadi penting, karena dengan modal perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dan melakukan pengembangan atau perluasan usaha. Modal kerja yang

⁶⁸ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

⁶⁹ Ahmad Jaelani, "Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murabahah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015) h.53

efekif menjadi sangat penting untuk kelangsungan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.⁷⁰

Sama halnya dengan Kasmir yang menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan, karena pemberian kredit dapat menambah modal usaha.⁷¹

Maharani menyatakan bahwa pendapatan suatu usaha tergantung dari modal yang dimiliki. Jika modal besar maka hasil produksi tinggi, sehingga pendapatan yang didapat juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika modal kecil maka hasil produksi rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh rendah. Modal yang cukup akan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha dan masyarakat pada umumnya.⁷²

Problematika pembiayaan agribisnis pada Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan memiliki beberapa kendala. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kendala tersebut khususnya bagi masyarakat petani di Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang antara lain :

- Risiko pembiayaan yang tinggi mengenai hasil panen yang masih bergantung pada kondisi alam.
- persyaratan yang ketat dalam pengajuan kredit, seperti jaminan tanah yang harus berupa sertifikat tanah.

⁷⁰ Wiksuana dan Panji Sedana, *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2001)

⁷¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi I. Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2010)

⁷² Maharani Tejasari, "*Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*", (Skripsi, Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2008).

- kelemahan manajemen usaha pertanian yang umumnya berskala mikro-kecil.
- keterbatasan kompetensi perbankan di bidang pertanian yakni bank belum sepenuhnya menguasai sektor bisnis tersebut.
- keterbatasan fasilitas seperti jangkauan wilayah prioritas layanan bank di desa-desa tertentu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Problematika dalam pembiayaan perkebunan kelapa pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan adalah:

- a. Minimnya informasi yang diperoleh petani tentang Bank Syariah Mandiri menjadikan petani kurang berminat mengajukan pembiayaan. Akibatnya, sektor pertanian menjadi kurang menarik bagi Bank Syariah Mandiri.
- b. Penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian masih kurang *matching*-dengan *nature* usaha di perbankan. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman, dan hasil produksi dan harga yang tidak menentu. Sementara transaksi di perbankan dilakukan secara reguler, misalnya untuk pembayaran angsuran dilakukan per bulan.
- c. Bank Syariah Mandiri belum berani menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian secara optimal pertanian merupakan suatu sektor usaha karena sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim, jaminan harga yang tidak pasti dan sebagainya.
- d. Perhatian sektor Bank Syariah Mandiri masih terfokus pada agribisnis modern dan perkebunan besar serta belum menyentuh para petani menengah dan kecil.
- e. Keterbatasan fasilitas seperti jangkauan wilayah prioritas layanan bank di desa-desa tertentu.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembiayaan agribisnis pada Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan masih memiliki beberapa kendala yang harus diperbaiki demi mendukung sektor bisnis yang menjadi komoditi utama masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri khususnya KCP Tembilahan perlu melakukan sosialisasi agar petani tidak minim terhadap informasi dengan cara menyebarkan selebaran/brosur produk kepada warga khususnya lokasi perkebunan kelapa atau memasang pamflet, melakukan pendekatan kepada pimpinan daerah setempat, dan mengajak warga untuk dapat berkumpul. Selanjutnya, pihak Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan dapat mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri baik yang bersifat sosial maupun bisnis.
2. Bank Syariah Mandiri perlu merumuskan skim pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik perkebunan kelapa.
3. Kebijakan pemerintah terhadap fasilitas program sertifikasi lahan secara berkelanjutan sebaiknya diaplikasikan guna membantu petani dalam mengatasi kendala persyaratan *collateral*.
4. Bank Syariah Mandiri sebaiknya lebih ekspansif dan proporsional terhadap pembiayaan di sektor pertanian. Mengoptimalkan dukungannya perbankan dalam alokasi pembiayaan ke sektor kelapa.

5. Tidak hanya memberikan pembiayaan untuk sektor agribisnis dalam skala besar tetapi juga harus bisa memberikan pembiayaan agribisnis ini kepada petani-petani langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ahmad Jaelani, “Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad *Murabahah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015).
- Anonim, *Pemetaan Komoditas Pertanian Unggulan Jawa Barat serta Potensi Pembiayaan Perbankan Syariah untuk Pengembangannya*, (Kerjasama Kantor Bank Indo nesia Bandung dengan Pusat Analisis Sosial Ekono, 2006).
- Antonius, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta : LPPBS, 1993).
- Ashari, *Peran Perbankan Nasional Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Di Indonesia* (Bogor:Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2009).
- Aviliani, *Kebijakan Perbankan dalam Sektor Agribisnis. Makalah disampaikan pada Round Table Discussion: Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian*. (Jakarta: Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis, FEM-IPB, 2009).
- BPRS PNM Al-Ma’soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Bandung : BPRS PNM Al-Ma’some,2004).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), Ed. 1 Cet VII.
- Company profile Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2010. Rencana strategis pembangunan perkebunan. Kementerian Pertanian, Jakarta. (TD).
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- <http://barifimultiply.com/journal/item/17>.
- <http://fajar14ek.blogstudent.mb.ipb.ac.id/tugas-kuliah/konsep-syariah-dalam-mengelola-bisnis-pertanian/>
- <http://home.inhilkab.go.id/bank/>
- <http://investasi.kontan.co.id/news/hasil-depositosyariah-masih-sekitar-9-1>

<http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah>

<http://www.nasrulartaanato-bratnisji.co.id>

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/09/opi02.html>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/pembiayaan-bank-syariah-tumbuh-4341>

<https://www.syariahmandiri.co.id>

Irawadi, D. 2000. Kontribusi teknologi proses dalam pembangunan agroindustri perkebunan menuju otonomi daerah. Ekspose Hasil Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan. 20 November 2000, Jakarta.

Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi I. Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2010).

Keuangan.kontan.co.id

Maharani Tejasari, "*Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*", (Skripsi, Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2008).

Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Marliah Tri, Skripsi: "*Analisis Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir*" (Yogyakarta: UIN SUKSA RIAU, 2011).

Moeloeng Lexy J, *Metode Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada Karya, 2002)
Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001).

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

Nurmanaf, et. al., *Analisis Sistem Pembiayaan Mikro dalam Mendukung Usaha Pertanian di Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2006).

Pengertian Sistem Agribisnis, <http://www.klikbbm.co.id>.

Prioritas Masalah Pertanian di Indonesia, <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resource/Publication/280016-1106130305439//agriculture.pdf>

- Pusat Pembiayaan Pertanian, *Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syariah Untuk Usaha Sektor Pertanian*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007).
- Pusat Pembiayaan Pertanian, *Buku Saku Skim Pola Pembiayaan Bagi Hasil/Syariah Untuk Usaha Sektor Pertanian*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007).
- Pusat Pembiayaan Pertanian, *Bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007).
- Siad Marhalim, *Consumer Banking Relationship Manager Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan*, wawancara di Tembilahan, tanggal 18 Mei 2018.
- Syukur, M., *et. al.*, *Kajian Pembiayaan Pertanian Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri di Perdesaan*, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2002).
- Uno, S.S. 2008. Agribisnis Asia Tenggara; Dimana posisi Indonesia?. *Majalah Agro Observer*, 15 Maret-15 April 2008.
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.
- Wiksuana dan Panji Sedana, *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2001).
- Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*, Jebi (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*) Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Cirebon : STAIN Press, 2009).
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azka Publisher, 2009).

LEMBAR TEKS WAWANCARA

WAWANCARA PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP TEMBILAHAN

PRODUK PEMBIAYAAN BANK MANDIRI SYARIAH

Nama Narasumber :

Jabatan :

Tanggal :

1. Apa saja produk dan jasa pembiayaan usaha produktif yang terdapat pada layanan Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan?
2. Jenis pembiayaan apa yang cocok untuk pelaku usaha agribisnis khususnya petani kelapa?
3. Bagaimana mekanisme pembiayaan pada sektor agribisnis? (6C)
4. Apa manfaat jika pelaku usaha agribisnis menggunakan jasa pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan?
5. Bagaimana cara pihak marketing Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan mempromosikan produk dan jasa layanan keuangannya pada masyarakat?
6. Bagaimana marketing mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan melihat potensi ekonomi dalam sektor agribisnis?
7. Apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan pada sektor agribisnis?
8. Sejauh mana hubungan antara Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan dengan pelaku usaha mikro dan juga pelaku usaha agribisnis?
9. Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang produk-produk Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan kepada para pelaku usaha agribisnis khususnya petani kelapa?

10. Apakah sebelumnya pernah ada sosialisasi kepada masyarakat petani di Indragiri Hilir mengenai produk dan jasa layanan keuangan di Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan?
11. Berapa presentase pengguna layanan Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan oleh pelaku usaha agribisnis?
12. Apa faktor penyebab masyarakat masih enggan menggunakan layanan Bank Syariah?
13. Apa yang diharapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan terhadap para pelaku usaha agribisnis?
14. Apakah layanan yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan baik dalam produk pembiayaan maupun jasa keuangan lainnya merupakan suatu solusi bagi pelaku usaha agribisnis khususnya petani kelapa?
15. Bagaimana cara Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan mempromosikan produk dan jasa layanan keuangannya pada pelaku usaha agribisnis khususnya petani kelapa?

WAWANCARA PADA PELAKU USAHA AGRIBISNIS/ PETANI

KELAPA DI INDRAGIRI HILIR-RIAU

HUBUNGAN PELAKU USAHA AGRIBISNIS (PETANI KELAPA)

DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI

Nama Narasumber :

Umur :

Alamat :

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mempunyai tabungan di Bank Syariah Mandiri/
Bank Syariah lain?
2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pernah menggunakan layanan keuangan di Bank
Syariah Mandiri/ Bank Syariah lain?
3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mempunyai tabungan di Bank Konvensional?
4. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i pernah menggunakan layanan keuangan di Bank
Konvensional?
5. Seberapa sering Bapak/Ibu/Sdr/i menggunakan layanan keuangan di
Bank?
6. Apakah pernah diadakan sosialisasi tentang Bank Syariah di daerah tempat
Bapak/Ibu/Sdr/i tinggal?
7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i apakah ada kendala dalam usaha agribisnis /
kelapa dalam segi pembiayaan?
8. Apakah pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
usaha agribisnis/ kelapa ini?
9. Jika ada produk pembiayaan yang sesuai dengan usaha Bapak/Ibu/Sdr/i
apakah tertarik untuk menggunakannya?

10. Bagaimana sikap pemerintah terhadap usaha agribisnis / kelapa khususnya dari segi pembiayaan?
11. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i lebih memilih Bank Syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional? Kenapa?
12. Apa yang diharapkan oleh pelaku usaha agribisnis/ petani kelapa kepada pemerintah maupun pihak swasta dalam meningkatkan hasil usaha khususnya dalam segi permodalan?

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO: 20/768-3/271

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Reza Jumentara

Jabatan : *Branch Manager*

Alamat : PT Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan
Jl. M. Boya No.4 Tembilahan Kota

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Universitas
1	Syaripuddin	2014570001	Manajemen Perbankan Syariah	Muhammadiyah Jakarta

Telah melakukan praktek penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Tembilahan terhitung mulai tanggal 16 April sampai dengan tanggal 24 Mei 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 24 Mei 2018

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KC Tembilahan



mandiri
syariah
KCP Tembilahan
Moh Reza Jumentara
Branch Manager



FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SYARIPUDIN
No. Pokok : 2014570001
Judul Skripsi : Analisis Intensitas Penggunaan Jasa Pembiayaan Agribisnis pada Bank Syariah.
Pembimbing : Bapak Nurhidayat, M.M.
Tgl. Berakhir : 14 Februari s.d 14 Agustus 2018

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	17/2/2018	Bab-1-3	lanjut penelitian	f
2	23/2/2018	Bab 4	Buat kuesioner dan instrumen	f
3	2/8/2018	Bab 1-3	lengkapi penelitian surat izin penelitian	f
4	2/8/2018	Bab 3	Metodologi penelitian	f
5	28/8/2018	Bab 4	lengkapi data penelitian	f
6	31/8/2018	Bab 4	perluas bab 4 dan hima hans men jawab rumusan masalah. lengkapi <u>abstrak</u>	f
7	1/9/2018	Bab 4	Daftar isi, Daftar pustaka lembar persetujuan	f
8	4/9/2018	Bab 1-5	Acc diujikan	f 4/9/2018



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA TELUK KELASA
KECAMATAN KERITANG

ALAMAT : Jl. Sulaiman RT. 05 RW. 02 Kode Pos 29274

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nonor : 01/Tlk-Skp/VI/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Dengan ini menerangkan bahwam .:

Nama Lengkap dan alias	: SYARIPUDDIN
Tempat dan tanggal lahir	: Teluk Kelasa,12-12-1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga negara	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Parit Kampar RT 07 RW 01

Menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian pada masyarakat Desa teluk kelasa tentang analisis intensitas penggunaan jasa pembiayaan agribisnis pada Bank syariah.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

TELUK KELASA, 08 Juni 2018
An. KEPALA DESA TELUK KELASA
PEMERINTAH AN
DESA TELUK KELASA
KECAMATAN KERITANG
NUSILA





